



JKAP
JURNAL KEBIJAKAN & ADMINISTRASI PUBLIK

Volume 17 Nomor 2 - November 2013

ISSN 0852-9213

DAFTAR ISI

Pengantar Redaksi — 2

Modal Sosial Pedagang Dalam Meningkatkan Daya Saing Pasar Tradisional

Mira Fatimah dan Mohammad Afifuddin — 4

Peran Modal Sosial dalam Pelestarian Hutan

M. Rijal dan Syaifullah Noer — 20

Modal Sosial dalam Kemandirian Masyarakat di Bidang Kesehatan

Kurniawan Arianto dan Eliza Nur Fitriana — 37

Peran Trust dalam Pengelolaan Bantuan Langsung Masyarakat

Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan di Kabupaten Kebumen

Sri Sugianingsih dan Abdiana Ilosa — 50

Studi Tentang Kemunculan Modal Sosial

Retno Widayani dan Nisa Agistiani Rachman — 65

Indeks — 76

Panduan untuk Penulis —78

Studi Tentang Kemunculan Modal Sosial

Retno Widayani

Pegawai Pemerintah Kota Sukabumi

retno.widayani@gmail.com

Nisa Agistiani Rachman

Mahasiswa Magister Administrasi Publik UGM

agistiani.nisa@gmail.com

Abstract

This research is on role social capital in society, using RW 13, Kelurahan Subangjaya, Cikole sub district, Sukabumi city, as the case study. The research delves into factors that are responsible for the increasing importance of social capital, and various ways social capital can be used to solve problems which the local government had failed to resolve. Based on research findings, it is evident that high level of social capital, which residents of RW 13, Kelurahan Subangjaya, Sukabumi City, facilitates easier and quicker mobilization. The high degree of social capital of RW 13 residents, is in part attributable to the high degree of homogeneity and leadership. However, it is worth noting that the application of the concept of exemplary behavior in the formation of social capital is only effective at the lowest primary social relation level such as RW and RT, and is found to face difficulties at higher social relations level in the community. Besides, good leadership with respect to social capital dynamics has adverse effect in the trajectory of the process as it creates dependence of community collective action on the existence of quality leadership.

Key words: Neighborhood (*rukun warga*), social capital, society

Abstrak

Naskah ini merupakan hasil penelitian tentang kemunculan modal sosial di masyarakat dengan mengambil studi kasus masyarakat RW 13 Kelurahan Subangjaya Kecamatan Cikole Kota Sukabumi. Selain itu, penelitian ini juga mendeskripsikan penyebab kemunculan modal sosial dan mendeskripsikan bagaimana modal sosial dapat berfungsi dalam mengatasi persoalan masyarakat yang tidak dipecahkan sepenuhnya oleh pemerintah. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dapat disimpulkan bahwa masyarakat RW 13 Kelurahan Subangjaya Kota Sukabumi telah memiliki semangat modal sosial yang cukup kuat dan telah ada secara alamiah sejak dulu dan telah turun temurun, sehingga sangat mudah untuk digerakkan. Kekuatan modal sosial di RW 13 lebih dipengaruhi oleh tingkat homogenitas masyarakat RW 13 yang masih kental. Selain itu, kepemimpinan juga berkorelasi positif terhadap kemunculan modal sosial di RW 13. Konsep keteladanan dalam eksistensi modal sosial hanya efektif jika diterapkan pada masyarakat dengan relasi primer di unit sosial yang kecil dan terbatas (primary social relation) seperti di tingkat RW dan RT dan akan menemui kesulitan jika diterapkan pada komunitas yang lebih besar. Di sisi lain, kepemimpinan yang baik membawa efek negatif, di mana kualitas modal sosial masyarakat menjadi tergantung pada kualitas pemimpin dalam aksi kolektifnya

Kata Kunci: Modal sosial, masyarakat, rukun warga

I. PENDAHULUAN

Penelitian ini menganalisis tentang kemunculan modal sosial di masyarakat dengan mengambil studi kasus masyarakat RW 13 Kelurahan Subangjaya Kecamatan Cikole Kota Sukabumi. Secara umum modal sosial di masyarakat mulai merosot tergerus arus globalisasi, sebagai contoh ketika mengundang masyarakat dalam rebug warga di Kelurahan, jika tidak ada uang pengganti *transport*, warga akan enggan untuk menghadiri. Sebelumnya rebug warga dihadiri warga secara sukarela.

Bantuan pemerintah dalam pembangunan di masyarakat membuat masyarakat lebih bergantung terhadap pemerintah dalam upaya pembangunan lingkungannya baik fisik maupun sosial. Hal itu bahkan membuat masyarakat menjadi materialistis dan penuh perhitungan yang berakibat pada hasil yang sangat jauh dari yang diharapkan. Menurut Abdullah (2000) dalam Hari M (2005) persoalan perubahan tersebut dinamakan "disintegrasi sosial" yang merupakan bahaya laten yang memengaruhi kemampuan masyarakat dalam menanggapi berbagai tantangan dan peluang ke depan.

Disintegrasi sosial di masyarakat mengakibatkan berkurang dan merosotnya modal sosial yang telah lama ada dan dipupuk dengan baik di masyarakat. Oleh karena itu penguatan modal sosial sangat dibutuhkan masyarakat untuk mencapai keberhasilan pembangunan, karena modal sosial merupakan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya di tengah-tengah masyarakat.

Penguatan modal sosial lebih efektif jika dimulai dari elemen masyarakat bawah seperti pada tingkat RW dan RT. Seperti yang terjadi di RW 13 Kelurahan Subangjaya Kota Sukabumi, sampai saat ini semangat kebersamaan dan kegotongroyongan

masih lekat di tengah masyarakat yang telah terkontaminasi arus globalisasi dan modernisasi saat ini. Meskipun kadarnya tidak sekuat masa sebelumnya namun jika dibandingkan dengan wilayah lain terutama sesama masyarakat transisi dari rural ke urban dengan latar belakang masyarakat yang sama, masyarakat RW 13 tergolong ke dalam masyarakat dengan modal sosial yang cukup kuat seperti ketika menerima bantuan hibah dari pemerintah, masyarakat bisa menghasilkan dua kali lipat dibandingkan dengan harapan pemerintah.

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini berusaha menjawab pertanyaan penelitian sebagai berikut: "*bagaimana kemunculan modal sosial di RW 13, apa penyebabnya, dan bagaimana bisa berfungsi dalam mengatasi persoalan masyarakat yang tidak dapat dipecahkan sepenuhnya oleh pemerintah?*"

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian modal sosial ini lebih memilih pendekatan kualitatif karena ditujukan untuk memahami suatu situasi sosial, peristiwa, peran, interaksi dalam kelompok masyarakat. Modal sosial di suatu komunitas masyarakat merupakan permasalahan yang sangat kompleks, sehingga metode kualitatif relevan untuk digunakan. Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah studi kasus, karena digunakan untuk mempelajari, menerangkan atau menginterpretasi kemunculan modal sosial secara natural tanpa ada intervensi dari pihak luar.

II. TINJAUAN TEORI

II.1 Pemaknaan Modal Sosial

Modal sosial merupakan suatu hal yang sebenarnya telah lazim dikenal di masyarakat di seluruh dunia walaupun berbeda-beda istilah maupun bentuknya.

Di Indonesia modal sosial termanifestasi ke dalam budaya gotong royong dan rembug warga. Tradisi tolong-menolong maupun gotong royong telah lama menjadi ciri khas negeri ini.

Sejak 20 tahun terakhir, modal sosial mulai menjadi pokok perbincangan yang banyak didiskusikan dalam ilmu-ilmu sosial. Dibuktikan dengan mulai bermunculan jumlah artikel jurnal yang memasukkan modal sosial sebagai kata kunci di mana sebelum tahun 1981 berjumlah 20 artikel, antara tahun 1991-1995 meningkat menjadi 109 artikel, dan antara tahun 1996-Maret 1999 meningkat drastis menjadi 1.003 artikel (Harper, 2001 dalam Field, 2010).

Grootaert (1998) menunjukkan bahwa dalam literatur ilmu politik, sosiologi dan antropologi, modal sosial secara umum merujuk pada norma-norma, jaringan dan organisasi yang berhubungan dengan masyarakat dalam memperoleh akses kekuasaan dan sumber daya serta pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan. Sehingga Grootaert menekankan peran penting dari adanya perkumpulan/asosiasi lokal, yang pada prinsipnya berperan melalui tiga cara yaitu (1) berbagi informasi di antara para anggota perkumpulan, (2) mengurangi berbagai perilaku oportunistik, dan (3) memfasilitasi pengambilan keputusan kolektif (Grootaert & Bastelaer, 2002).

Sedangkan James Coleman (1988) menyebut social capital sebagai kemampuan masyarakat untuk bekerja bersama-sama demi mencapai tujuan-tujuan bersama di dalam berbagai kelompok dan organisasi (Fukuyama, 2002).

Dari berbagai definisi tersebut di atas dan fenomena modal sosial di RW 13 tersebut di atas, menurut penulis dapat disimpulkan bahwa berdasarkan konsep pendekatan moral pada intinya modal sosial merupakan suatu sumber daya berupa bentuk ikatan hubungan yang mampu menggerakkan

orang-orang dalam suatu komunitas untuk bekerja sama dalam jangka waktu lama yang menumbuhkan kepercayaan dan resiprositas dengan dilandasi norma-norma yang disepakati guna mencapai tujuan bersama.

Modal sosial jika dilihat dari proses kemunculannya bisa dibedakan menjadi dua yaitu secara natural/alamiah yang telah ada sejak dulu kala dan diupayakan muncul atau dilahirkan secara sengaja. Upaya memunculkan modal sosial dapat dibedakan ke dalam lima kategori (GBC, 2001 dalam Mintara, 2003) yaitu:

1. *Specifically-targeted intervention*, bahwa intervensi dari luar (dari negara, lembaga sosial atau kelompok yang lebih mampu) hanya dilakukan terhadap mereka yang belum dapat membantu dirinya sendiri atau dapat dikatakan belum sampai tahap self-help. Sehingga target intervensi diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup orang miskin melalui akses solidaritas serta terhadap mereka yang hak-hak azasinya dirampas.
2. *Measures of partnership*, bahwa orang miskin merupakan tokoh utama. Namun, jika terlalu lemah diperlukan upaya kerja sama dengan partner lain yang kompeten.
3. *Identification of existing social capital*, bahwa jika dilakukan intervensi dari luar, dimaksudkan bukan untuk menghancurkan modal sosial yang sudah ada, justru dijadikan fondasi bagi kerja sama dan penciptaan modal sosial yang lebih sesuai dengan kebutuhan saat ini.
4. *Permeability of a society*, bahwa di satu pihak melibatkan semua kelompok orang, terutama kaum miskin dan minoritas dalam memperoleh pelayanan sosial dan berpartisipasi secara aktif dalam proses sosial. Dan di sisi lain mobilitas sosial masyarakat

dikembangkan melalui penciptaan kerangka kerja yang tepat.

5. *Two types of intervention*, bahwa hal tersebut mencakup pertama tolok ukur yang berorientasi pada nilai-nilai, sikap dan tingkah laku dengan fokus terhadap pengembangan kerja sama individu. Dan kedua, kerja sama sosial yang didukung oleh reformasi institusional serta struktur yang memberdayakan.

Modal sosial secara positif telah dirasakan manfaatnya bagi banyak pihak terutama bagi masyarakat, organisasi maupun individu. Dalam pidato pengukuhan guru besar Djamaludin Ancok (2003) menyatakan bahwa manfaat-manfaat tersebut antara lain:

1. Manfaat bagi masyarakat

Bahwa seperti pernyataan Putnam (1993) yaitu pertumbuhan ekonomi sangat berkorelasi dengan kehadiran modal sosial, yang pertumbuhan ekonomi suatu masyarakat akan baik apabila memiliki ciri-ciri: (1) hadirnya hubungan yang erat antar anggota masyarakat, (2) adanya para pemimpin yang jujur dan egaliter yang memperlakukan dirinya sebagai bagian dari masyarakat bukan sebagai penguasa, dan (3) adanya rasa saling percaya dan kerja sama di antara unsur masyarakat.

2. Manfaat bagi organisasi

Bahwa modal sosial memungkinkan manusia bekerja sama dalam menghasilkan sesuatu yang besar. Pengetahuan manusia akan terakumulasi lebih cepat melalui interaksi antar manusia dalam berbagai wawasan. Pengetahuan yang terakumulasi sebagai hasil interaksi sosial akan menjadi kekuatan organisasi karena bisa melahirkan berbagai inovasi. Kualitas

sinergi organisasi dipengaruhi oleh semangat kerja sama, rasa saling percaya yang berkorelasi dengan intensitas kerja sama itu sendiri.

3. Manfaat bagi individu manusia

Dari berbagai hasil penelitian para ahli dapat disimpulkan bahwa individu yang memiliki modal sosial yang tinggi akan lebih maju dalam karirnya dibandingkan dengan individu yang modal sosialnya lebih rendah. Kesuksesan seseorang dalam pekerjaan juga dipengaruhi oleh kualitas modal sosial yang dimilikinya.

Modal sosial diasumsikan memiliki peran yang semakin penting dalam strategi pengurangan kemiskinan menurut versi Bank Dunia. Berdasarkan Laporan Pembangunan Bank Dunia bahwa pembangunan modal sosial dalam pengurangan kemiskinan itu teridentifikasi dalam tiga strategi yaitu kesempatan promosi, fasilitasi pemberdayaan, dan asuransi pendapatan. Pembangunan modal sosial merupakan pokok agenda pemberdayaan, bersama dengan promosi reformasi kelembagaan pro-miskin dan penghapusan hambatan sosial.

Selain itu modal sosial juga merupakan aset penting untuk menciptakan peluang meningkatkan kesejahteraan dan mencapai keamanan yang lebih besar dan mengurangi kerentanan. (World Bank, 2001 dalam Grootaert & Bastelaer, 2002). Dalam *Social Capital: One Element in the Battle Against the Poverty of Societies* disebutkan bahwa modal sosial memiliki empat fungsi, yaitu:

1. *Fungsi sosio-budaya*, modal sosial bisa menjadi jembatan antara nilai-nilai yang berkembang karena arus globalisasi dengan nilai-nilai tradisional yang ada di dalam masyarakat. Modal sosial mampu menghambat terjadinya imperialisme budaya dan juga mampu mendukung terciptanya budaya hukum yang

kondusif bagi kebebasan warga negara dalam berpartisipasi baik pada proses politik maupun pembangunan serta relasi antar individu, kelompok maupun institusi di dalam masyarakat/negara.

2. *Fungsi politik.* Bahwa modal sosial juga memiliki andil atas terciptanya pranata pemerintahan yang lebih demokratis, hukum maupun perlindungan hak asasi manusia. Dalam fungsi ini, modal sosial mampu menjamin partisipasi dan keamanan hidup masyarakat, bahkan masyarakat miskin pun memiliki akses dalam proses pembangunan maupun dalam pengambilan keputusan (*decision making*).
3. *Fungsi sosial.* Bahwa modal sosial mampu meningkatkan solidaritas antara satu orang dengan lainnya dalam pengembangan kebijakan baik dalam arti ekonomi maupun sosial, sehingga mampu membuka akses orang-orang miskin/terpinggirkan untuk mendapatkan pelayanan sosial yang lebih terjamin sebagai salah satu contohnya.
4. *Fungsi ekonomi.* Bahwa modal sosial mampu mereduksi biaya transaksi yang berhubungan dengan mekanisme koordinasi formal seperti kontrak, hirarki, aturan birokratik, dan sebagainya. Sangat dimungkinkan dalam sebuah transaksi untuk membuat tindakan terkoordinasi di antara suatu group orang yang tidak memiliki modal sosial, tetapi akan menelan tambahan biaya transaksi seperti dalam monitoring, negosiasi, litigasi, dan pelaksanaan kesepakatan formal. Sistem kontrak tidak dapat menspesifikasikan setiap ketidakpastian yang muncul antar pihak.

Dahulu kala, Subangjaya dikenal sebagai Kampung Subang. Namun masyarakat lebih mengenal wilayah RW 13

yang lebih mewakili kampung Subang bukan Kelurahan Subangjaya secara keseluruhan. Terkenalnya kampung Subang (RW 13) karena kekompakan masyarakatnya terutama dalam bergotong royong membangun desa.

Sebanyak 76% masyarakat RW 13 berpenghasilan kurang dari Rp. 1.000.000,-, pendidikan mayoritas masyarakat RW 13 adalah lulusan SD yaitu sekitar 45% dengan mata pencaharian mayoritas masyarakatnya adalah sebagai buruh baik itu buruh bangunan maupun buruh tani sebanyak 38%. Meskipun tingkat diferensiasi mata pencaharian cukup beragam tidak menjadikan interaksi antar profesi menjadi terganggu, masyarakat tidak berinteraksi secara kelompok-kelompok namun membaaur menjadi satu.

Tingkat perekonomian yang rendah tidak menghalangi kegiatan gotong royong masyarakat dalam membangun lingkungan maupun sosial. Masyarakat RW 13 sependapat bahwa tidak perlu menunggu bantuan pemerintah untuk membangun lingkungan ataupun menolong warga yang membutuhkan. Prinsip tersebut tercermin dalam visi yang dimiliki dalam ke-RW-an yaitu "Terwujudnya Masyarakat RW 13 yang Maju dan Mandiri" yang dijabarkan dalam misi yang telah dirancang bersama yaitu *pertama*, menciptakan kondisi masyarakat yang "*cageur* (sehat wal afiat jasmani dan rohani), *bageur* (baik hati/memiliki jiwa sosial yang tinggi), *pinter* (pandai/cerdas dalam berfikir maupun bertindak) *tur singer* (cekatan dalam menghadapi masalah)", dan *kedua*, menciptakan lingkungan yang "Genah (lingkungan yang enak), *merناه* (sesuai pada tempatnya) *tur tumaninah* (nyaman)".

III. HASIL ANALISIS DAN DISKUSI

III.1 Proses Kemunculan Modal Sosial di RW 13 Kelurahan Subangjaya

Kekuatan modal sosial menjadi ciri khas yang diakui oleh warga di sekitar RW 13, bahkan sebelum bergabung ke dalam wilayah Kota Sukabumi. Desa Subangjaya merupakan bagian dari Kabupaten Sukabumi (terluas di Jawa-Bali), sehingga cukup jauh dari jangkauan Pemerintah Daerah saat itu. Hal tersebut tidak menghambat masyarakat RW 13 dalam meningkatkan kemajuan wilayahnya baik dari infrastruktur maupun aktivitas sosial warga.

Terbukanya akses jalan maupun listrik ke wilayah RW 13 merupakan hasil dari modal sosial masyarakat. Dengan dukungan stimulan dari Pemerintah Kota Sukabumi dan swadaya masyarakat RW 13 berhasil membangun jembatan beton sebagai akses utama sehingga bisa dilalui kendaraan roda empat.

Seluruh warga RW 13 beragama Islam akan tetapi terbagi dalam dua pemahaman yang berbeda namun tidak menjadi penghalang kerukunan di antara warga. Sekitar dua periode kepemimpinan RW sebelumnya sempat terjadi krisis kepercayaan, karena dipimpin oleh seorang ketua RW yang kurang adil dan kurang transparan dalam pertanggungjawabannya.

Trust menurut Putnam (1993) merupakan "*willingness to take risk*", yaitu interaksi didasarkan pada perasaan yakin (*sense of confidence*) bahwa orang lain akan menunjukkan respon seperti yang diharapkan dan akan saling mendukung, atau paling tidak orang lain tak akan bermaksud menyakiti yang memunculkan perasaan aman (*perceived safety*) saat berinteraksi dengan orang lain.

Periode berikutnya, dipimpin oleh Ketua RW yang mampu bersikap adil dan transparan, sehingga mampu meraih kembali kepercayaan masyarakat serta menggalakan kembali semangat kerukunan dan kegotongroyongan warga. Baru satu tahun memimpin, beliau meninggal dunia.

Pemilihan Ketua RW 13 selama ini dilakukan dengan diwakili oleh beberapa kepala keluarga dan para tokoh masyarakat saja. Namun atas kesepakatan bersama, pemilihan Ketua RW dilakukan melalui pemilihan langsung yang aturan mainnya merupakan hasil musyawarah bersama. Setiap anggota masyarakat bebas menunjuk siapapun yang diinginkan menjadi Ketua RW kemudian disaring menjadi 5 calon ketua RW dari 20 kandidat terpilih. Dari 5 calon tersebut dipilih secara langsung oleh warga melalui bilik suara dan terpilihlah Bapak Iman Surahman sebagai ketua RW 13.

Ketua RW terpilih berinisiatif mengadakan rapat terbuka dengan masyarakat. Dia mengajak masyarakat untuk meneruskan aktivitas yang dijalankan pada masa kepemimpinan Ketua RW sebelumnya. Masyarakat diajak untuk mandiri, tidak hanya mengandalkan pemerintah namun bersama-sama dalam menyelesaikan segala permasalahan yang dihadapi. Pemerintah bukanlah atasan RW, sehingga masyarakat di bawah koordinasi Kelurahan harus mampu bersinergi dengan baik untuk kemajuan bersama. Kemudian dia mengajak para warga yang sekiranya mau dan mampu untuk menjadi pengurus RW dan menjadi koordinator pembangunan maupun kegiatan sosial kemasyarakatan.

Ketua RW 13 merupakan aktor dalam kemunculan (kembali) modal sosial. Keingintahuan mempelajari kebiasaan dan kehidupan masyarakat setempat memunculkan inisiatif untuk

memberdayakan kembali masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan di RW 13.

Berdasarkan inisiatif Ketua RW 13 dan didukung para tokoh masyarakat, kepercayaan masyarakat menjadi meningkat. Hal itu dibuktikan dengan meningkatnya kesadaran berpartisipasi masyarakat dalam setiap kegiatan aksi kolektif, pengurus RW lebih terbuka dan transparan dalam pertanggungjawaban aksi kolektif tersebut. Salah satu contohnya adalah laporan *rereongan sasendok* yang selalu rutin dilaporkan penerimaan dan pengeluarannya setiap 6 bulan sekali melalui surat resmi dari tiap RT ke setiap kepala keluarga.

Berdasarkan proses kemunculan modal sosial, menurut Mintara (2003), modal sosial telah ada di RW 13 secara alamiah namun sempat merosot beberapa tahun yang lalu dan berhasil dimunculkan kembali oleh ketua dan pengurus RW terpilih, menggunakan pendekatan *two types of intervention*.

Tipe itu mencakup dua tolok ukur yaitu *pertama*, yang berorientasi pada nilai-nilai, sikap dan tingkah laku dengan fokus terhadap pengembangan kerja sama individu seperti *rereongan sasendok* sebagai salah satu inovasi modal sosial wujud kepedulian warga dengan tetangga sekitar yang lebih membutuhkan.

Kedua, kerja sama sosial yang didukung dengan reformasi institusional serta struktur yang memberdayakan. Perombakan struktur kepengurusan RW yang memberdayakan masyarakat dengan memanfaatkan nilai yang dianut masyarakat setempat yaitu jika seseorang dilibatkan dalam kegiatan sosial kemasyarakatan berarti orang tersebut dihargai atau dianggap keberadaannya di tengah masyarakat dan selalu menjunjung tinggi nama baik wilayah.

Hal itu merupakan salah satu elemen modal sosial yang dimiliki masyarakat RW 13. Menurut Putnam (1993) dalam Fukuyama (1995) bahwa norma-norma dibangun dan berkembang berdasarkan sejarah kerja sama di masa lalu dan diterapkan untuk mendukung iklim kerja sama. Sehingga mampu menjadikan modal sosial lebih mudah dimunculkan dan dipertahankan eksistensinya di lingkungan RW 13.

III.2 Penyebab Kemunculan Modal Sosial di RW 13 Kelurahan Subangjaya

Keberadaan modal sosial di tengah masyarakat akan selalu mengalamidinamika pasang surut, tidak selalu kuat, seringkali mengalami kemerosotan, bahkan hilang. Namun tidak menutup kemungkinan akan kembali menguat. Modal sosial di RW 13 dapat dikatakan telah ada secara alamiah sejak dulu kala, hanya saja mengalami masa-masa surut meskipun tidak dapat dikategorikan musnah bahkan bisa dikatakan selalu bertahan.

Muncul, tumbuh dan bertahannya semangat kebersamaan di masyarakat sebagai wujud modal sosial tersebut berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua RW 13 dan tokoh masyarakat setempat disebabkan karena latar belakang masyarakat itu sendiri, baik secara ekonomi, sosial maupun budayanya.

Secara ekonomi bahwa sekitar 76% masyarakatnya tergolong miskin dilihat dari pendapatan mereka menyebabkan rasa kebersamaan itu muncul adalah wajar, karena merasa sama-sama kurang mampu maka melalui kebersamaan tersebut akan mampu menyelesaikan masalah yang mungkin dirasakan oleh masing-masing individu namun seragam seperti pembuatan sarana mandi, cuci, kakus (MCK) umum, dapat menyelesaikan masalah MCK masing-masing keluarga yang belum memiliki,

rereongan sasendok dapat menyelesaikan masalah kelaparan maupun pertolongan lain yang dibutuhkan masyarakat dan masih banyak lagi manfaat yang mereka dapatkan ketika berpartisipasi dalam menggalang modal sosial.

Secara sosial, bahwa berdasarkan latar belakang pendidikan masyarakat yang hampir 50% adalah lulusan SD, sehingga masing-masing merasa tidak mampu menyelesaikan masalahnya sendiri tanpa bantuan masyarakat lain, membuat mereka selalu berembug untuk bisa menyelesaikan masalah yang dihadapinya.

Selain itu dengan munculnya berbagai masalah sosial yang mereka hadapi membuat mereka semakin merasa membutuhkan akan adanya kebersamaan maupun modal sosial yang dianggap mampu menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi.

Secara budaya, bahwa kebersamaan dan kegotong-royongan telah ada dan dimiliki masyarakat RW 13 sejak dulu kala yang telah membudaya di masyarakat RW 13 memudahkan proses kemunculan modal sosial, seperti yang dikutip dari penjelasan Ketua RW 13 bahwa asal ada yang menggerakkan, maka masyarakat sangat mudah untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan karena mereka sangat menjunjung tinggi nama baik wilayah.

Selain itu dengan adanya latar belakang budaya yang sama yaitu budaya Sunda, dan masyarakatnya cenderung homogen baik dari sisi budaya maupun agama, serta jaranganya pendatang yang masuk ke wilayah tersebut, maka memudahkan modal sosial bertahan di RW 13.

Untuk tetap menjaga tali silaturahmi dan keeratan hubungan antar warga RW 13, mereka memiliki tradisi tahunan yang selalu diselenggarakan sejak dulu kala yaitu jalan santai bersama yang wajib diikuti semua anggota keluarga yang

dilaksanakan bertepatan dengan peringatan kemerdekaan Indonesia (setiap 17 Agustus) yang dilanjutkan makan bersama (botram) yang diselenggarakan untuk seluruh warga RW 13 di sepanjang jalan Kobra dengan menggunakan daun pisang yang dijajarkan tanpa dibelah.

Pemerintah ada untuk melayani masyarakat, mencukupi kebutuhan hajat hidup orang banyak yang direalisasikan melalui program-programnya. Penyusunan program pemerintah terutama pada Pemerintah Kota Sukabumi tidak terlepas dari peran serta masyarakat. Sebagian besar program Pemerintah Kota Sukabumi berasal dari masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), yang diawali dari tingkat kelurahan yang dihadiri oleh para tokoh masyarakat dari seluruh RW yang ada di kelurahan tersebut, kemudian berlanjut pada tingkat kecamatan dan juga dilanjutkan ke tingkat kota.

Sebagian besar usulan terakomodir selama anggaran yang disiapkan memang mencukupi. Sehingga hampir setiap kegiatan pembangunan fisik maupun nonfisik di tingkat RW sekalipun, pemerintah turut serta andil di dalamnya melalui program-program yang telah direncanakan sebelumnya.

Namun tidak jarang pula program-program pemerintah yang masuk ke wilayah kelurahan maupun RW tidak tepat sasaran bahkan banyak menyisakan permasalahan tersendiri bukan menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat. Dapat dicontohkan oleh Ketua RW 13 yaitu program bantuan-bantuan yang langsung diberikan kepada masyarakat seperti kepada Kelompok Tani, bantuan ekonomi mikro sering tidak berkoordinasi dengan pihak ke-RW-an.

Ketika kelompok sasaran tersebut ternyata bermasalah, pihak yang memberi bantuan mengajukan surat teguran ke pihak RW dan para pengurus RW tidak tahu-

menahu adanya program tersebut, justru malah menyisakan masalah baru, dan setelah ditelusuri memang benar kelompok sasaran yang menerima bantuan bukanlah sasaran yang tepat.

Pihak pengurus RW berharap jika pemerintah ingin memberikan bantuan setidaknya berkoordinasi terlebih dahulu, sehingga akan ditemukan sasaran yang memang benar-benar sesuai dengan kebutuhan program yang akan lebih bermanfaat dan berkesinambungan.

Menurut Ketua RW 13, segala sesuatu yang melibatkan masyarakat sudah seharusnya dimusyawarahkan terlebih dahulu, sehingga dapat dipertanggungjawabkan di kemudian hari. Karena sudah menjadi kebiasaan di RW 13, jika ada program pembangunan baik fisik maupun non fisik yang akan dijalankan di wilayah tersebut selalu dimusyawarahkan dan melibatkan seluruh kepala keluarga yang ada. Semua rencana pembangunan tersebut disusun oleh masyarakat.

Melalui musyawarah, keputusan apakah program tersebut akan diterima atau tidak, dikembalikan ke masyarakat, dengan konsekuensi jika diterima masyarakat harus berkomitmen untuk mau berpartisipasi, jika memang tidak siap ataupun tidak berkenan, program sebegus apapun dan dana berapapun akan mereka tolak.

Menurut Ketua RW 13, bahwa berbagai program pemerintah yang dijalankan di wilayah mereka telah dirasakan cukup membantu, namun ada satu masalah yang sampai saat ini belum mampu terantisipasi oleh pemerintah maupun masyarakat setempat yaitu permasalahan sampah.

Masyarakat Subangjaya termasuk warga RW 13 memiliki kebiasaan buruk yang sampai saat ini belum menunjukkan perubahan yang lebih baik, yaitu dalam membuang sampah sembarangan. Sebagian

besar masyarakat terbiasa membuang sampah tidak pada tempatnya baik itu di lahan kosong maupun ke sungai. Hal itu terjadi secara merata di semua wilayah Kelurahan Subangjaya (kecuali wilayah perumahan). Untuk itu pemerintah membuat program/kegiatan pembuatan Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPSS) hampir di setiap lingkungan RW, hanya saja program/kegiatan tersebut dianggap mustahil dilaksanakan di RW 13 karena terkendala oleh lokasi yang sulit dijangkau mobil pengangkut sampah, sehingga sampai saat ini solusi yang diberikan hanyalah sebatas ide yang sulit terealisasi.

IV. PENUTUP

IV.1 Kesimpulan

Semangat modal sosial di RW 13 sebagai wilayah peralihan dari rural ke urban telah dimiliki masyarakat setempat secara alamiah dan turun temurun sehingga lebih mudah digerakkan untuk mempertahankan modal sosial.

Kemampuan itu diperkuat karena tingkat homogenitas masyarakat RW 13 yang masih kental, seperti menganut agama yang sama, kondisi sosial ekonomi mayoritas masyarakat setempat menengah ke bawah, di mana salah satunya bisa dilihat dari indikator jumlah penghasilan yang kurang dari Rp. 1.000.000,- sebanyak 76%, latar belakang pendidikan mayoritas masyarakatnya adalah lulusan SD sekitar 45%, hubungan kekerabatan yang relatif dekat serta sama-sama berada di wilayah yang agak terisolir dari wilayah lainnya.

Kemunculan modal sosial di RW 13 juga dipengaruhi oleh sosok pemimpin yang menerapkan sistem kepemimpinan transformasional, lebih menekankan nilai-nilai yang relevan bagi proses pertukaran (perubahan), seperti kejujuran, keadilan

dan tanggung jawab. Kepemimpinan mempunyai korelasi positif terhadap kemunculan modal sosial.

Keteladanan seorang publik figur atau tokoh masyarakat seperti di RW 13 hanya bisa efektif jika diterapkan pada masyarakat dengan relasi primer seperti di tingkat RW dan RT dan akan menemui kesulitan jika diterapkan pada komunitas yang lebih besar. Jika diferensiasi dan stratifikasi sosial masyarakat semakin kompleks, maka modal sosial di RW 13 akan mudah merosot jika tidak ditanamkan sebagai sebuah karakter individu dalam setiap pribadi warga yang tinggal di wilayah tersebut.

Pembentukan karakter warga tidak hanya melalui penerapan tatanan dan peraturan hukum namun harus diperkuat melalui sistem pembangunan tata nilai di masyarakat dengan mengedepankan tercapainya pengokohan nilai-nilai positif karakter suatu wilayah.

Pembentukan karakter warga di RW 13 dapat memanfaatkan keberadaan tokoh masyarakat yang masih memiliki peran penting sebagai panutan dalam aksi kolektif warga. Tokoh masyarakat RW 13 harus bisa menjadi agen perubahan (*change agent*) yang memiliki kemampuan untuk mengenali berbagai peluang untuk melakukan perubahan ke arah kemandirian masyarakat.

Pembentukan karakter masyarakat yang kuat juga dilakukan sejak dini baik itu terhadap anak-anak maupun para remajanya dan dimulai dari dalam setiap keluarga yang tinggal di wilayah tersebut. Akumulasi dari pembentukan karakter keluarga akan terbentuk karakter masyarakat yang kuat di wilayah tersebut, sehingga siapapun yang menjadi pemimpinnya, tidak akan menurunkan semangat modal sosial masyarakat.

IV.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan, maka rekomendasi yang dapat penulis berikan adalah *pertama*, untuk Pemerintah Kelurahan dan Kecamatan di Kota Sukabumi serta Pemerintah Kota Sukabumi agar dalam menjalankan programnya dilakukan melalui pendekatan terhadap para tokoh masyarakat setempat, harus transparan dalam pertanggungjawaban pelaksanaan program/kegiatannya kepada masyarakat.

Dengan demikian rasa kepemilikan masyarakat tumbuh terhadap program yang dijalankan jangan sampai masyarakat merasa antipati terhadap pemerintah, dan melibatkan secara langsung masyarakat dalam program atau kegiatan tersebut dengan manajemen yang baik dari pemerintah.

Kedua, untuk tokoh masyarakat RW 13 Kelurahan Subangjaya agar selalu menjunjung tinggi nama baiknya sebagai panutan masyarakat, selalu memberikan keteladanan yang baik dan selalu menerapkan sistem kepemimpinan transformasional sebagai motor penggerak masyarakat dalam mempertahankan modal sosial di wilayah setempat, dan membina masyarakat dalam membangun karakter yang kuat agar terlepas dari rasa ketergantungan terhadap pemimpin, sehingga seorang pemimpin hanyalah berperan sebagai manajer dalam mengelola sumber daya yang dimiliki masyarakat di wilayah RW 13.

Ketiga, untuk Pengurus RW 13 sebagai jembatan antara masyarakat dengan pemerintah maupun *stakeholder* lain hendaknya meningkatkan koordinasi dalam setiap kegiatan yang membutuhkan kerja sama dengan *stakeholder*.

Keempat, untuk masyarakat RW 13 hendaknya memperkuat karakter individu setiap anggota keluarganya dengan mengajak setiap anggota keluarga untuk saling peduli, tolong-menolong dalam kebaikan, musyawarah dalam mengambil keputusan, bertindak jujur dalam setiap perkataan dan perbuatan, altruism, dan rasa tanggungjawab terhadap setiap hasil yang dicapai secara akuntabel dalam kehidupan sehari-harinya.

Masyarakat hendaknya dalam menjalankan setiap kegiatan yang berkaitan dengan kegotong-royongan maupun musyawarah, hendaknya tidak menggantungkan diri terhadap para tokoh masyarakat yang menjadi panutan, siapapun orangnya asalkan menjadi anggota masyarakat RW 13 memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk berpartisipasi untuk mempertahankan dan meningkatkan modal sosial yang masih menjadi tradisi masyarakat RW 13.

DAFTAR PUSTAKA

- Ancok, Djameludin. 2003. *Modal Sosial dan Kualitas Masyarakat*. Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
- Field, John. 2010. *Modal Sosial*. Terjemahan Nurhadi. Editor Inyik Ridwan Muzir. Kreasi Wacana. Bantul.
- Fukuyama, Francis. 2002. *Trust Kebajikan Sosial dan Penciptaan Kemakmuran*. (diterjemahkan dari Buku *Trust The Social Virtues and The Creation of Prosperity*. 1995). Qalam. Yogyakarta.
- Grootaert, Christiaan. 1998. *Social Capital: The Missing Link?. Social Capital Initiative Working Paper No. 3*. The World Bank. www.siteresources.worldbank.org/INTSOCIALCAPITAL/.../SCI-WPS-03.pdf. 19 Juli 2011.
- Grootaert, Christiaan and Thierry van Bastelaer. 2002. *Understanding and Measuring of Social Capital: A Multidisciplinary Tool for Practitioners*. The World Bank. Washington DC. USA.
- Hari M., Widyono. 2005. *Rukun Tetangga sebagai Basis Modal Sosial di Tingkat Lokal dalam Desentralisasi, Globalisasi, dan Demokrasi Lokal*. Editor Gunawan, Jamil et. al. LP3ES. Jakarta.
- Mintara, Agustinus. 2003. *Modal Sosial dalam Arus Globalisasi*. Majalah Basis. No. 01-02. Tahun ke-52. Yayasan BP Basis. Yogyakarta.
- Putnam, Robert. D. 1993. *Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy*. Princeton University Press. USA.

PANDUAN UNTUK PENULIS

Redaksi Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik (JKAP) mengundang pembaca untuk mengirimkan tulisan untuk dimuat di jurnal ini. Ketentuan penulisan naskah adalah sebagai berikut.

1. Naskah dapat berupa hasil penelitian, artikel berisi pemikiran dan penilaian terhadap buku, yang belum dan tidak akan dipublikasikan dalam media cetak lain.
2. Naskah harus asli, bukan jiplakan, dan tidak mengandung unsur plagiarisme.
3. Naskah ditulis dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris baku dengan intisari dalam Bahasa Inggris DAN Bahasa Indonesia. Intisari tidak lebih dari 250 kata dengan disertai 3-5 istilah kunci (*keyword*).
4. Naskah berupa ketikan asli atau *soft copy* dengan panjang antara 15 sampai 25 halaman. Diketik di kertas ukuran A4, Times New Roman font 12, spasi ganda.
5. Judul diusahakan cukup informatif dan tidak terlalu panjang, judul yang terlalu panjang harus dipecah menjadi judul utama dan anak judul.
6. Naskah ditulis dengan sistematika jelas yaitu Pendahuluan, Tinjauan Teori, Metode Penelitian, Hasil Analisis dan Diskusi, Penutup (terdiri dari Kesimpulan dan Saran). Penomoran sistematika menggunakan huruf Romawi.
7. Naskah ditulis dengan menggunakan pedoman ilmiah (judul, karangan, judul tabel, daftar pustaka, kutipan, dll), mengikuti panduan pengutipan yang benar.
8. Penulisan daftar pustaka mengikuti aturan APA-Harvard, ditulis dalam urutan abjad secara kronologis:
 - a. Untuk buku: nama pengarang. tahun terbit. *judul*. edisi. nama penerbit. tempat terbit.
Contoh:
Hicman, G.R dan Lee, D.S. 2001. *Managing Human Resources in The Public Sectors: A Share Responsibility*. Harcourt Collage Publisher. Forth Worth.
 - b. Untuk karangan dalam buku: nama pengarang. tahun. judul karangan. *judul buku*. nama editor. halaman permulaan dan akhir karangan.
Contoh:
Mohanty, P. K. 1999. Minicapality Decentralization and Governance: Autonomy, Accountability and Participation. *Decentralization and Local Politics*. Editor S.N. Jan and P.C. Marthur. Sage Publication. New Delphi. 212-236.
 - c. Untuk karangan dalam jurnal/majalah: nama pengarang. tahun. judul karangan. *judul jurnal/majalah*. volume(nomor). halaman permulaan dan halaman akhir karangan.
Contoh:
Dwiyanto, Agus. 1997. Pemerintahan yang Efisien, Tanggap dan Akuntabel: Kontrol atau Etika?. *JKAP*. 1(2): 1-4.
 - d. Untuk karangan dalam pertemuan: nama pengarang. tahun. judul karangan. *nama pertemuan*. tempat pertemuan. waktu.
Contoh:
Utomo, Warsito. 2000. Otonomi dan Pengembangan Lembaga di Daerah. *Seminar Nasional Professional Birokrasi dan Peningkatan Kinerja Pelayanan Publik*. Jurusan Administrasi Negara, FISIPOL UGM. Yogyakarta. 29 April 2000.

KETENTUAN BERLANGGANAN

Kami ingin mengajak Anda untuk menjadi pelanggan Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik (JKAP). JKAP terbit dua kali setahun dengan harga satuan Rp40.000,- (belum ongkos kirim).

Hubungi kami di (0274) 563825, isi dan fax form di bawah ini beserta bukti pembayaran ke (0274) 589655 atau kirim melalui e-mail ke igpa@ugm.ac.id. Pembayaran dapat ditransfer ke Bank Mandiri Cabang UGM No. Rek. 1370092054119.

Paket Langganan	Harga Langganan Pulau Jawa	Harga Langganan Luar Pulau Jawa
1 tahun	Rp80.000,- (gratis ongkos kirim)	Rp80.000,- (diskon ongkos kirim 50%)
2 tahun	Rp160.000,- (gratis ongkos kirim)	Rp160.000,- (diskon ongkos kirim 50%)
3 tahun	Rp320.000,- (gratis ongkos kirim)	Rp320.000,- (diskon ongkos kirim 50%)

YA, SAYA MAU MENJADI PELANGGAN JKAP

Nama :
Instansi :
Jabatan :
Alamat :
E-mail :
Telepon : (Rumah)
(Kantor)

PESAN SEKARANG

Transfer ke Bank Mandiri No. Rek. 1370092054119

Dari Bank :
No. Rekening :
Tgl/bln/thn :

